



**IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
TAHUN 2021**



Drs. KH. Anwar Sadat, M.Ag
Bupati Tanjung Barat



Hairan, SH
Wakil Bupati Tanjung Barat

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT**



OLEH :
H. YAN ERY, S.Pt, M.Si
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kab. Tanjung Jabung Barat

VISI

**“Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH”
(Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetatif, Aman dan Harmonis)**

-
- 01** Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berilmu dan Berakhlak
 - 02** Cipta Kondisi Sosial yang Tentram, Tertib dan Harmonis
 - 03** Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik untuk Pelayan Publik
 - 04** Peningkatan Aktifitas Perekonomian Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan
 - 05** Pemerataan Pembangunan Daerah dari Desa Sampai ke Kota

5 MISI

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

RENSTRA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Tujuan dan Sasaran

TABEL : T.C-26

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

VISI : Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berkah (Berkualitas, Ekonomi Maju, Relegius, Kompotitif, Aman dan Harmonis)

MISI III : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik untuk Pelayanan Publik

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Meningkatkan Kualitas aparatur pelayanan sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada investor dengan cara mengubah pemahaman (mindset) aparatur dari dilayani menjadi melayani	Meningkatnya kualitas dan penambahan SDM
		Menerapkan sistem Pelayaan Perizinan Terpadu Sehingga tercipta pelayanan yang mudah, efektif, transparan dan akuntable	Mengembangkan aplikasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta implementasi sistem pelayanan perizinan dengan pusat (OSS)
		Menerapkan pola online system dalam memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat untuk mendorong penanaman modal mengajukan perizinan secara online	Memenuhi kebutuhan sarpras
			meningkatnya koordinasi antar OPD teknis
			Melaksanakan penyederhanaan, standarisasi prosedur dan pengembangan proses perizinan secara paralel untuk mempercepat proses

RENSTRA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

MISI IV :	Peningkatan aktivitas perekonomian dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Penanaman Modal yang Berkelanjutan	Meningkanya Investasti Daerah	Memperkuat data peluang investasi yang prospektif untuk dikembangkan	Meningkatkan layanan promosi dan investasi
		Promosi peluang investasi yang terencana dengan memperkuat basis data di website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta menggalang temu usaha dengan calon investor potensial di dalam dan luar negeri	meningkatkan pemantauan dan pengawasam investasi
		Menjamin kepastian berushaa dengan merespon dan menyelesaikan secara cepat setiap kondisi yang berpeluang menciptakan konflik baik itu berkaitan dengan kebijakan maupun perselisihan lainnya	memperluas penyebaran informasi potensi, promosi, peluang investasi dan prosedur pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
		Merancang dan menerbitkan peraturan daerah yang mampu memberikan kemudahan berinvestasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	

CASCADING

CASCADING DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

CASCADING (POHON KINERJA)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

VISI : MEWUJUDKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH
(Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetatif, Aman dan Harmonis)

MISI III : Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang Baik untuk Pelayanan Publik
MISI IV : Peningkatan Aktifitas Perekonomian Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

TUJUAN I : Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel
TUJUAN II : Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten yang berkelanjutan

SASARAN I : 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
SASARAN II : Meningkatnya Perekonomian Kabupaten

ESS II

ESS III

ESS IV

SASARAN STRATEGIS I

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Indikator Kinerja (IKU)	Target		Realisasi
	2020	2021	2020
Indeks Kepuasan Masyarakat	90	A	94,87

SASARAN STRATEGIS II

Meningkatnya Investasi Daerah

Indikator Kinerja (IKU)	Target		Realisasi
	2020	2021	2020
Persentase Peningkatan Investasi	5%	162 m	17.13%

SEKRETARIS

Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Keuangan	1. Pemenuhan Komponen IKM 2. Pemenuhan Komponen SAKIP 3. Laporan Keuangan Tepat Waktu

KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Sasaran	Indikator Kinerja
Terinventarisasinya data perizinan dan non perizinan	Keluanya Rekomendasi untuk terbitnya izin dan non perizinan

KEPALA BIDANG PENGADUAN KEBIJAKAN DAN PELAPORAN

Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Tersedianya Data Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 3. Tersedianya Produk Hukum Daerah Bidang Perizinan dan Penanaman Modal

KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN SISTEM INFORMASI

Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatnya Investasi Di Daerah	Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah

KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN IKLIM DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL

Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatkan Investasi Daerah	1. Tersedianya data/Informasi Pengembangan Penanaman Modal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2. Tersedianya data/ informasi Promosi Penanaman Modal 3. Terlaksananya promosi potensi daerah dan produk unggulan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN

Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatnya Kualitas Penata Usahaan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan 2. Jumlah Penyampaian Laporan LPJ 3. Jumlah Laporan Keuangan yang disampaikan

Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Penyediaan Sapras Aparatur dan Disiplin	1. Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Sarana Prasarana Aparatur 2. Persentase Peningkatan Disiplin Kapasitas Aparatur

KASUBBAG PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	1. Jumlah Dokumen Perencanaan 2. Jumlah Penyampaian Lapom Kinerja 3. Jumlah Laporan Kinerja yang disampaikan dalam Satu Tahun

KASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN I

Sasaran	Indikator Kinerja
Terinventarisasinya data perizinan dan non perizinan	Keluanya Rekomendasi untuk terbitnya izin dan non perizinan

KASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN II

Sasaran	Indikator Kinerja
Terinventarisasinya data perizinan dan non perizinan	Keluanya Rekomendasi untuk terbitnya izin dan non perizinan

KASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN III

Sasaran	Indikator Kinerja
Terinventarisasinya data perizinan dan non perizinan	Keluanya Rekomendasi untuk terbitnya izin dan non perizinan

KASI PENGADUAN DAN INFORMASI LAYANAN

Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Masyarakat	Terlaksananya layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pengguna layanan perizinan dan non perizinan

KASI KEBIJAKAN DAN PENYULUHAN LAYANAN

Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan perizinan dan non perizinan 2. Tersusunya produk hukum daerah bidang perizinan dan penanaman modal

KASI PELAPORAN DAN PENINGKATAN LAYANAN

Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatnya Kualitas dan Kinerja Pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Terlaksananya Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pengguna layanan perizinan dan non perizinan

KASI PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL

Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatnya Investasi Di Daerah	1. Tersedianya Data dan Informasi Perkembangan Realisasi Penanaman Modal 2. Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang di laksanakan

KASI PEMBINAAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatnya Investasi Di Daerah	Sosialisasi Aturan Dan Ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal

KASI PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatnya Investasi Di Daerah	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

KASI PERENCANAAN PENANAMAN MODAL

Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatnya Investasi di Daerah	Tersedianya Data/ Informasi Pengembangan Penanaman Modal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

KASI PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatnya Investasi di Daerah	Tersedianya Data/ Informasi promosi penanaman modal

KASI PROMOSI PENANAMAN MODAL

Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatnya Investasi di Daerah	Terlaksananya Promosi Potensi Daerah dan Produk Unggulan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

CASCADING DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

**VISI : MEWUJUDKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH
(Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetatif, Aman dan Harmonis)**

**MISI III : Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang Baik untuk Pelayanan Publik
MISI IV : Peningkatan Aktifitas Perekonomian Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan**

**TUJUAN I : Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel
TUJUAN II : Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten yang berkelanjutan**

**SASARAN I : 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
SASARAN II : Meningkatnya Perekonomian Kabupaten**

ESS II

SASARAN STRATEGIS I

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Indikator Kinerja (IKU)	Target		Realisasi
	2020	2021	2020
Indeks Kepuasan Masyarakat	90	A	94,87

ESS III

SEKRETARIS	
Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Keuangan	1. Pemenuhan Komponen IKM 2. Pemenuhan Komponen SAKIP 3. Laporan Keuangan Tepat Waktu

KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	
Sasaran	Indikator Kinerja
Terinventarisasinya data perizinan dan non perizinan	Keluarnya Rekomendasi untuk terbitnya izin dan non perizinan

KEPALA BIDANG PENGADUAN KEBIJAKAN DAN PELAPORAN	
Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Tersedianya Data Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 3. Tersedianya Produk Hukum Daerah Bidang Perizinan dan Penanaman Modal

ESS IV

KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN	
Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatnya Kualitas Penata Usahaan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan 2. Jumlah Penyampaian Laporan LPJ 3. Jumlah Laporan Keuangan yang disampaikan
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Penyediaan Saprasi Aparatur dan Disiplin	1. Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Sarana Prasarana Aparatur 2. Persentase Peningkatan Disiplin Kapasitas Aparatur

KASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN I	
Sasaran	Indikator Kinerja
Terinventarisasinya data perizinan dan non perizinan	Keluarnya Rekomendasi untuk terbitnya izin dan non perizinan

KASI PENGADUAN DAN INFORMASI LAYANAN	
Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Masyarakat	Terlaksananya layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pengguna layanan perizinan dan non perizinan

KASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN II	
Sasaran	Indikator Kinerja
Terinventarisasinya data perizinan dan non perizinan	Keluarnya Rekomendasi untuk terbitnya izin dan non perizinan

KASI KEBIJAKAN DAN PENYULUHAN LAYANAN	
Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan perizinan dan non perizinan 2. Tersusunnya produk hukum daerah bidang perizinan dan penanaman modal

KASUBBAG PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	
Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	1. Jumlah Dokumen Perencanaan 2. Jumlah Penyampaian Lapom Kinerja 3. Jumlah Laporan Kinerja yang disampaikan dalam Satu Tahun

KASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN III	
Sasaran	Indikator Kinerja
Terinventarisasinya data perizinan dan non perizinan	Keluarnya Rekomendasi untuk terbitnya izin dan non perizinan

KASI PELAPORAN DAN PENINGKATAN LAYANAN	
Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatnya Kualitas dan Kinerja Pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Terlaksananya Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pengguna layanan perizinan dan non perizinan

SASARAN STRATEGIS II

Meningkatnya Investasi Daerah

Indikator Kinerja (IKU)	Target		Realisasi
	2020	2021	2020
Persentase Peningkatan Investasi	5%	162 m	17.13%

KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN SISTEM INFORMASI

Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatnya Investasi Di Daerah	Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah

KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN IKLIM DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL

Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatkan Investasi Daerah	1. Tersedianya data/Informasi Pengembangan Penanaman Modal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2. Tersedianya data/ informasi Promosi Penanaman Modal 3. Terlaksananya promosi potensi daerah dan produk unggulan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

KASI PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL

Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatnya Investasi Di Daerah	1. Tersedianya Data dan Informasi Perkembangan Realisasi Penanaman Modal 2. Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang di laksanakan

KASI PERENCANAAN PENANAMAN MODAL

Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatnya Investasi di Daerah	Tersedianya Data/ Informasi Pengembangan Penanaman Modal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

KASI PEMBINAAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatnya Investasi Di Daerah	Sosialisasi Aturan Dan Ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal

KASI PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatnya Investasi di Daerah	Tersedianya Data/ Informasi promosi penanaman modal

KASI PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatnya Investasi Di Daerah	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

KASI PROMOSI PENANAMAN MODAL

Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatnya Investasi di Daerah	Terlaksananya Promosi Potensi Daerah dan Produk Unggulan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KAB. TANJUNG JABUNG BARAT



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan. Letkol Pol. Toegino NO. 06 Telp/ Fax. (0742) 7351124
KUALA TUNGKAL

Kode Pos : 36555

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 503/77.1/ DPM-PTSP/ 2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN					SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan		
1	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	1 Indeks Kepuasan Masyarakat	INDEKS KEPUASAN MASYRAKAT (IKM) TERHADAP Pelayanan Perijinan DALAM 1 TAHUN ANGGARAN					Laporan Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
			1	1,00-1,75	25-43,75	D	Tidak Baik		
			2	1,76-2,50	43,76-62,50	C	Kurang Baik		
			3	2,51-3,25	62,51-81,25	B	Baik		
			4	3,26-4,00	81,26-100,00	A	Sangat Baik		

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KAB. TANJUNG JABUNG BARAT



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan. Letkol Pol. Toegino NO. 06 Telp/ Fax. (0742) 7351124
KUALA TUNGKAL

Kode Pos : 36555

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 503/77.1/ DPM-PTSP/ 2019

TENTANG

TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN IDNIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
2	Meningkatnya investasi Daerah	2 Persentase Peningkatan Investasi	Nilai Investasi Tahun $N - N-1 / N-1 \times 100 \%$	Laporan Data Realisasi Investasi	Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi

PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA (PK) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. YAN ERY, S.Pt. M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. H. ANWAR SADAT, S.Ag, M.Ag
Jabatan : Bupati Tanjung Jabung Barat
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Drs. H. ANWAR SADAT, S.Ag, M.Ag

H. YAN ERY, S.Pt. M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19700930 199703 1 003

**PERJANJIAN KINERJA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2021**

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A
2	Meningkatnya Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Investasi	162 M

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 4.472.914.688,00	APBD
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 4.200.000,00	APBD
3	Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 45.900.000,00	APBD
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 100.199.750,00	APBD
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 32.040.000,00	APBD
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 18.060.000,00	APBD
	Jumlah	Rp. 4.673.314.438,00	

Kuala Tungkal, 2021

Bupati Tanjung Jabung Barat

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Drs. H. ANWAR SADAT, S.Ag, M.Ag

H. YAN ERY, S.Pt. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19700930 199703 1 003

**PERJANJIAN KINERJA
(PK)
ESELON II**

PERJANJIAN KINERJA (PK) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KABID PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN SISTEM INFORMASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. A. ZAENUDDIN, S.Sos

Jabatan : Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dan Sistem Informasi

Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : H. YAN ERY, S.Pt, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, Januari 2021

PIHAK KEDUA

H. YAN ERY, S.Pt, M.Si

PIHAK PERTAMA

H. A. ZAENUDDIN, S.Sos

PERJANJIAN KINERJA TAHUN
KABID PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Investasi Daerah	Pertumbuhan Realisasi Investasi	162M

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
Program : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			
Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan :			
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 14.300.000,00	
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 13.665.000,00	
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 4.075.000,00	
Program : Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal			
Kegiatan : Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan :			
1	Pengolahan, Penyajian dan pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp. 18.060.000,00	

Kuala Tungkal, Januari 2021

KEPALA DPMPTSP

(PIHAK KEDUA)

H. YAN ERY, S.Pt, M.Si
NIP. 19700930 199703 1 003

KABID PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL DAN SISTEM INFORMASI
(PIHAK PERTAMA)

H. A. ZAENUDDIN, S.Sos
NIP. 19641231 198803 1 075

PERJANJIAN KINERJA
(PK)
ESELON III

PERJANJIAN KINERJA (PK) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KASI PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **RISKY ANDRIANSYAH, SE**

Jabatan : Kasi Pengolahan Data Dan Informasi Penanaman Modal

Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : **H. A. ZAENUDDIN, S.Sos**

Jabatan : Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dan Sistem Informasi

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, Januari 2021

PIHAK KEDUA

H. A. ZAENUDDIN, S.Sos

PIHAK PERTAMA

RISKY ANDRIANSYAH, SE

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KASI PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Investasi Di Daerah	Tersedianya Data dan Informasi Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Jumlah Pengolahan Sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang dilaksanakan	1 Kegiatan 1 Laporan

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KET
I	Program : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		
	Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
	Sub Kegiatan :		
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 14.300.000,00	
II	Program : Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal		
	Kegiatan : Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
	Sub Kegiatan :		
1	Pengolahan, Penyajian dan pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp. 18.060.000,00	

Kuala Tungkal, Januari 2021

KABID PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL DAN SISTEM
INFORMASI
(PIHAK KEDUA)

H. A. ZAENUDDIN, S.Sos
NIP. 19641231 198803 1 075

KASI PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI
PENANAMAN MODAL
(PIHAK PERTAMA)

RISKY ANDRIANSYAH, SE
NIP. 19860907 201001 1 011

**PERJANJIAN KINERJA
(PK)
ESELON IV**

CAPAIAN TERHADAP IKU

CAPAIAN IKU TAHUN 2021

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

SASARAN STRATEGIS I : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

INDIKATOR KINERJA (IKU)	TARGET	REALISASI
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	2021	2021
	A	A
% CAPAIAN		100%

UPAYA PENCAPAIAN :

1. Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang menunjang
2. Komitmen tinggi aparatur dalam meningkatkan pelayanan
3. Optimalisasi koordinasi dengan SKPD Teknis

SASARAN STRATEGIS II : Meningkatnya Investasi Daerah

INDIKATOR KINERJA (IKU)	TARGET	REALISASI
PERSENTASE PENINGKATAN INVESTASI	2021	2021
	162 M	1.048 T
% CAPAIAN		646,51%

UPAYA PENCAPAIAN :

1. Pembinaan kepada pelaku usaha untuk melaporkan LKPM yang dilakukan secara intensif.
2. Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal secara Rutin, terhadap PMA dan PMDN.
3. Pemberian Reward & Punishment kepada pelaku usaha yang melaporkan LKPM sesuai ketentuan.
4. Menyediakan Ruang Klinik LKPM untuk pendampingan dalam pelaporan LKPM.

RENCANA AKSI

RENCANA AKSI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

				3. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Pelayanan Konsultasi dan Pengaduan yang dirindakan/juati	4 laporan	Cetak laporan, rapat penyediaan makan dan minum, iklan spot radio, pengadaan pakaian dinas lapangan	20.150.000,00	Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi	√			√		√		√	
				4. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Daerah	Jumlah Produk Hukum Pemberian Fasilitas Investasi daerah yang diterbitkan	3 Produk Hukum	Cetak himpunan peraturan, rapat makan dan minum, penyediaan produk hukum	12.312.250,00				√			√			√
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			32.040.000,00										
				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Pemahaman Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal			32.040.000,00										
				1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Tersedianya Data dan Informasi Perkembangan Realisasi Penanaman Modal	1 Laporan	Persiapan Rapat, Penyediaan Makan dan Minum Rapat, Analisis dan Rekapitulasi Data Penanaman Modal, Pemantauan ke Lokasi Usaha	14.300.000,00				√		√		√		√
				2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi/ Bimbingan Teknis Aturan Ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal terhadap pelaku Usaha	2 Kali	Persiapan Rapat, Penyediaan Makan dan Minum rapat, Pelaksanaan Bimtek, Penyusunan Laporan, Pembinaan Perusahaan	13.665.000,00			√	√		√		√		√
				3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang dilakukan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	12 BAP	Persiapan Rapat, Penyediaan makan dan minum rapat, pengawasan ke lokasi usaha, penyusunan laporan	4.075.000,00			√		√		√		√	√
				Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatnya Kualitas Sistem Perizinan berusaha terintegrasi secara Elektronik			18.060.000,00										
				Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Penerapan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			18.060.000,00										
				1. Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik	1 Laporan	Analisis Data : Persiapan Rapat, Penyediaan Makan dan Minum Rapat, Pengelolaan Sistem Informasi Perizinan berbasis elektronik, Penyusunan Laporan	18.060.000,00			√		√		√		√	

MONITORING RENCANA AKSI 2021
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI				SUMBER DATA
				I	II	III	IV	
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	A		A			Laporan Hasil Survei IKM
2.	Meningkatnya Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Investasi	162 M	PMA Rp. 347.231.800 PMDN Rp. 970.470.653.225 Total Rp. 970.817.885.025	PMA Rp. 9.687.154.604 PMDN Rp. 67.834.967.635 Total Rp. 77.552.122.239			Laporan Data Realisasi Investasi Total Realisasi 2021 sampai Triwulan II Rp. 1.048.340.007.264

HASIL EVALUASI SAKIP 2019

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019

oleh Inspektorat: 68,30 (Kategori B Baik)

Dengan Rincian Penilaian :

<u>Uraian</u>	<u>Bobot</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Perencanaan Kinerja	: 30	22,44	23,67
Pengukuran Kinerja	: 25	15,94	15,31
Pelaporan Kinerja	: 15	10,42	9,62
Evaluasi Kinerja	: 10	6,95	5,85
Capaian Kinerja	: 20	7,19	13,85
Nilai Hasil Evaluasi	: 100	62,94	68,30
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

TINDAK LANJUT REKOMENDASI EVALUASI SAKIP TAHUN 2019



REKOMENDASI TAHUN 2019



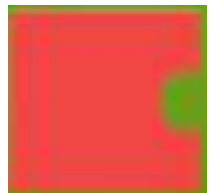
Target yang ditetapkan belum dilengkapi dengan basis data yang memadai dan argument logis



Target-target kinerja sasaran dalam rencana kinerja dimaksud tidak menjadi prasyarat dalam pengajuan anggaran



Target kinerja telah dimonitor namun tidak ada tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan



Belum ada Reward & Punishment



Rekomendasi dari hasil evaluasi Rencana Aksi yang ditindak lanjuti masih dibawah 75%

TINDAK LANJUT TAHUN 2019



Penentuan Target Kinerja dilakukan melalui rapat internal Kadis, Sekretaris, Kabid dan Kasi



Pada pelaksanaan Verifikasi Renja, memastikan kinerja apa yang akan dihasilkan terlebih dahulu sebelum mengajukan anggaran



Target Kinerja yang telah dimonitor telah di tindak lanjuti sesuai dengan perjanjian kinerja secara keseluruhan



Telah melakukan pemberian Reward berupa Piagam Penghargaan kepada Pelaku Usaha yang telah Melaporkan LKPM sesuai ketentuan dan Punishment Berupa Surat Teguran Tertulis kepada Pelaku Usaha jika tidak melaporkan LKPM



Evaluasi Rencana Aksi telah ditindak lanjuti dalam bentuk Langkah-Langkah nyata yaitu dengan melaksanakan 7 Program dan 33 Kegiatan dengan capaian Realisasi keuangan sebesar 97,97% dan Fisik sebesar 99,49%



PENCAPAIAN IKU TERHADAP TARGET RPJMD



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DPM PTSP

No	IKU	TARGET RPJMD						REALISASI
		TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2021
1	Indek Kepuasan Masyarakat	A	A	A	A	A	A	A
2	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	162 M	232 M	301 M	370 M	440 M	509 M	1.048 T

**DUKUNGAN
PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA
DAERAH (IKD)**



1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

- Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya
- Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

- Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

- Kegiatan : Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota



3

3. Program Promosi Penanaman Modal

- Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
 - Sub Kegiatan : Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
 - Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

- Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 - Sub Kegiatan : Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
 - Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Intensif Daerah

5

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

- Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
 - Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal



6

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

- Kegiatan : Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
 - Sub Kegiatan : Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

LANGKAH-LANGKAH OPTIMALISASI PENERAPAN SAKIP

- Adanya sosialisasi dan pemeahaman SAKIP kepada seluruh ASN di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Adanya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan/penerapan SAKIP sebagai pengendalian agar pelaksanaan tepat waktu dan sasaran serta
- Sebagai bahan perbaikan perencanaan kedepan

Terima
kasih

